

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada Desember 2015. Dalam periode ini, masa pendaftaran calon kepala daerah telah digelar 3 hari di 19 daerah diseluruh JATIM, tepatnya tanggal 26-28 Juli kemarin, namun ada beberapa kota dan kabupaten yang diperpanjang pendaftarannya baru mulai tanggal 29-31 Juli 2015, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan. Daftar dari 16 daerah yang sudah menyerahkan ke KPU JATIM untuk direkapitulasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pasangan Calon Kepala Daerah/Wali Kota Beserta Partai Pengusungnya Se-JATIM

Kab./Kota	Partai Pengusung	No. Urut Paslon	Cabup./Cawali	Calon Wakil Bup./Kota
Kab. Kediri	PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PBB, dan PPP	1 (Incumbent)	Hariyanti Sutrisno	Masykuri
	Gerindra, dan PAN	2	Ari Purnomo Adi	Arifin Tafsir
Kab. Trenggalek	PKB	1	Kholiq	Priyo Handoko
	PDIP, Demokrat, Golkar, Gerindra, dan PAN	2	Emil Elestianto	Mochammad Nur Arifin
Kab. Sidoarjo	PDIP, Nasdem, Demokrat, dan PBB	1	Hadi Soecipto	Abdul Kholik
	PKB	2	Saiful Illah	Nur Achmad Syaifuddin
	Gerindra, dan PKS	3	Utsman Ikhsan	Ida Astuti
	Golkar, dan PAN	4	Warih Andono	Imam Sugiri
Kab. Ngawi	PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, PAN, Hanura, dan Demokrat	1 (Incumbent)	Budi Sulistiyono	Ony Anwar
	Independen	2	Agus Bandono	Adi Susila
Kota Pasuruan	Independen	1	Yus Samsul Hadi Subakir	Agus Wibowo
	PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, dan PPP	2	Setiyono	Raharto Teno Prasetyo
	PKB, Hanura, PKS, Nasdem	3	Hasani	M. Yasin
Kab. Lamongan	Demokrat, PKB, PDIP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, dan Hanura	1	Fadeli	Kartika Hidayati
	Independen	2	Mujianto	Sueb
	Independen	3	Nur Salim	Edy Wijaya
Kota Blitar	PDIP	1	Samanhudi Anwar	Santoso
	Independen	2	Mochsin	Dwi Sumardianto
Kab. Jember	Gerindra, PKB, PKS, Golkar, PPP, dan Demokrat	1	Sugiarto	Dwi Koryanto
	Nasdem, PDIP, Hanura, dan PAN	2	Faida	Miqid Arif
Kab. Malang	Independen	1	Nur Cholis	Muhammad Mufidz
	Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, dan Gerindra	2	Rendra Kresna	M. Sanusi
	PDIP	3	Dewanti Rumpoko	Masrifah Hadi
Kab. Ponorogo	Independen	1	Misranto	Isnen
	Golkar, Demokrat,	2	Sugiri Sancoko	Sukirno

	PKS, dan Hanura			
	Gerindra, PAN, Nasdem	3	Ipong Muchlissoni	Soedjarno
	PKB, dan PDIP	4	Amin	Agus Widodo
Kab. Situbondo	PDIP, dan Demokrat	1	Abdullah Faqih Ghufron	Untung
	PPP dan Gerindra	2	Abdul Hamid Wahid	Achmad Fadil Muzakki Syah
	PKB	3	Dadang Wigiarto	Yoyok Mulyadi
Kab. Mojokerto	PDIP, Demokrat, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, dan Nasdem	1	Mustofa Kamal Pasa	Pungkasiadi
	Independen	2	Misnan	Rahma Sofiana
	PKB, PPP, PBB, dan Hanura	3	Choirun Nisa	Arifudinsyah
Kab. Sumenep	PKB dan PDIP	1	Busyro Karim	Achmad Fauzi
	PAN, Gerindra, Golkar, PPP, PBB, Demokrat, Hanura, dan PKS	2	Zainal Abidin	Dewi Khalifah
Kab. Banyuwangi	PDIP, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, dan PKB	1 (Incumbent)	Abdullah Azwar Anas	Yusuf Widiatmoko
	Golkar dan Hanura	2	Sumantri Soedomo	Sigit Wahyuidodo
Kab. Tuban	PKB, PKS, PAN, PDIP, Gerindra, Nasdem, Hanura, dan Demokrat	1 (Incumbent)	Fathul Huda	Noor Nahar Hussein
	Independen	2	Zakky Mahbub	Dwi Budiarti
Kab. Gresik	PDIP, PAN, dan Gerindra	1	Husnul Huluq	Ahmad Rubai
	PKB dan Demokrat	2	Sambari	Qosim
	Golkar	3	Nur Hamim	Junaidi

Sumber : <http://politik.news.viva.co.id/news/read/654407-ini-daftar-45-pasangan-di-pilkada-serentak-se-jawa-timur, 2015>.

Seperti tabel diatas menunjukkan pasangan calon bupati atau walikota beserta wakilnya yang maju dalam pemilihan kepala daerah pada tanggal 09 Desember 2015. Dari 16 kota/kabupaten yang direkapitulasi oleh komisioner KPU lebih dari 2 kabupaten/kota yang calonnya adalah incumbent atau petahana.

Salah satunya adalah Bupati Kediri, yaitu Hayati Sutrisno yang meneruskan jejak suaminya Sutrisno yang menjabat sebagai Bupati selama 2 periode berturut-turut. Haryati Sutrisno adalah istri pertama dari Sutrisno yang paling diunggulkan pertama kali dikarenakan beliau mendapat dukungan penuh dari suaminya yang juga sampai sekarang menjabat sebagai ketua DPC PDIP di

Kabupaten Kediri. Haryanti bersama calon pasangannya Masyukuri merasa percaya diri dengan strateginya dapat berkoalisi dengan berbagai partai mulai dari Golkar, Demokrat, PKB, PBB dan PPP yang lebih banyak menduduki kursi pemilihan di DPRD. Sebelumnya Haryanti mendapat lawan dari istri sirih ke tiga Sutrisno yaitu Sayekti. Sayekti yang diusung dari partai Nasdem besutan Surya paloh membawa nama Sayekti dalam bursa pencalonan bupati. Namun sebelum data-data diserahkan kepada KPU, ternyata Lutfi Mahmudiono memerintahkan untuk mengurungkan calonnya dengan alasan bahwa Nasdem tidak mau terseret dalam alur mencari keuntungan dalam proses pemilihan bupati ini, karena menurutnya pemilihan kepala daerah tahun ini sudah tidak sehat. Sehingga membuat Nasdem memilih untuk abstain di pencalonan paslon Bupati tahun ini. Sehingga membuat Haryanti dan pasangan calon wakilnya Masyukuri sedikit bernafas lega karena dalam periode ini hanya 1 lawan yang tersisa dalam persaingan mendapatkan jabatan bupati tahun 2015-2020. Pasangan yang diusung Gerindra dan PAN kali ini adalah lawan terberat Haryanti dan Masyukuri dalam pemenangannya dipemilihan Bupati 2015. (*sumber: Tempo; Selasa, 28 Juli 2015*)

Lawan Haryanti dalam pilkada periode ini adalah dr. Ari purnomo Adi dan calon wakilnya Arifin Tafsir yang diusung dari partai Gerindra dan PAN sebagai pilihan koalisinya. Namun pada awalnya Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri mempunyai 3 kandidat pasangan calon yang akan diusungnya dalam bursa paslon Bupati di Kediri. Ketiganya adalah Yuliantoro, M. Kamim, dan Dewi Woni Merdekowati, ketiganya ini yang akan dibawa ke tingkat DPD dan DPP. Tetapi keputusan DPD tidak merekom calon yang diusung Arif Junaidi Ketua DPC Partai Gerindra, setelah melalui proses yang panjang pada akhirnya DPD Partai Gerindra menunjuk dr. Ari Purnomo Adi sebagai paslon utama yang lebih layak untuk diusung Partai Gerindra dalam pemenangannya, figur yang direkom DPP Partai Gerindra adalah figur yang layak secara potensial dan finansial dari 8 nama yang diajukan. Dr. Ari Purnomo Adi adalah anggota Kesehatan Indonesia Raya yang meskipun bukan dari struktural Partai Gerindra namun beliau sangat tegas dan kritik tentang persoalan politik, apalagi beliau mengerti betul tentang politik dinasti yang dibangun oleh keluarga Sutrisno, yang istrinya adalah lawan

incumbent dalam pemenangan Pilkada Kabupaten Kediri ini. Setelah mendaftarkan ke KPU, barulah mesin strategi Partai Gerindra digerakkan untuk memenangkan Pilkada Kabupaten 2015 di Kediri.

Dalam strategi pemenangan Partai Gerindra adalah salah satunya mengajak oposisi partai lain untuk berkoalisi dipemilihan bupati periode ini. Partai yang sekaligus mencalonkan sebagai wakil yaitu Partai Amanat Nasional. Wakil yang diusung oleh PAN tak lain adalah Ketua DPC PAN sendiri, yaitu Arifin Tafsir. Setelah melakukan komunikasi politik secara intern barulah PAN mulai bergabung dengan Partai Gerindra guna mengusung nafas baru untuk rakyat di Kabupaten Kediri kedepannya. Seperti yang sudah dilansir oleh Ketua DPC Partai Gerindra Arif Junaidi, bahwa koalisi ini siap memenangkan pemilukada Kabupaten Kediri dengan target perolehan suara 75 persen. *“Strategi kita karena calon yang kita usung adalah dokter kita kana road show ke desa-desa untuk pengobatan gratis, kita akan minta tambahan ambulan ke DPP 10 unit”* sambung Arif. Saat ini pihak paslon masih sebatas melakukan konsolidasi serta mengadakan penggalangan relawan yang sampai saat ini sudah banyak bergabung, team pemenangan juga terdiri dari unsur relawan yang terdiri dari Mahasiswa, Kepemudaan, Ormas dan sudah banyak lagi dari masyarakat sendiri ataupun LSM yang menyatakan untuk bergabung. Team inti yang terdiri dari unsur Partai yaitu dari Partai Gerindra dan PAN, sementara untuk team ranting secara otomatis terbentuk karena menggunakan struktur partai yang sudah mapan. Strategi pemenangan yang sudah dirancang baik lewat struktur partai maupun diluar struktur partai sendiri, Partai Gerindra dan PAN bertanggung jawab merawat dan mengembangkan basis massa tradisonalnya. Team diluar partai bertugas untuk mengerjakan wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh team partai dan juga selanjutnya dibentuk lagi relawan-relawan dari setiap desa di Kabupaten Kediri. Guna lebih mendekati kepada masyarakat, team pemenangan dr.Ari-Arifin(AA) juga telah menyediakan tiga posko yang berada diluar partai dan rumah Paslon. Penyediaan posko berada di Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, setelah itu ada juga di wilayah Simpang Lima Gumul dan di sebelah utara kantor Kabupaten Kediri. Selain berkaca kekuatan intern sendiri team sukses dr.Ari-

Arifin(AA) juga banyak belajar tentang strategi HARMAS kepada masyarakat beserta pendekatan-pendekatannya. Tak lupa juga tetap menjunjung moral bangsa serta sportifitas dalam ajang pemilihan Bupati 2015 di Kediri. (*sumber:* <http://www.lensaindonesia.com/2015/07/28/koalisi-gerindra-pan-kediri-usung-dokter-junior-lawan-incumbent.html>)

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

- Bagaimana Partai Gerindra membangun koalisi dengan PAN untuk dapat mengukung pasangan calon Ari-Arifin dalam pilbup di Kabupaten Kediri ?
- Strategi apa yang dirancang Gerindra untuk memenangkan pasangan calonnya pada Pilbup 2015 di Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana strategi Partai Gerindra dalam membangun koalisi dengan partai lain yang mengukung pasangan calonnya pada Pilbup 2015.
- Guna mengetahui bagaimana cara Partai Gerindra dalam membangun strateginya untuk memenangkan paslonnya pada Pilbup 2015 di Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dikajikan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- Kritis

Manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri adalah mengkaji semua materi yang telah dipelajari secara teoritik kedalam penerapan studi kasus dilapangan. Bermanfaat bagi saya apa yang akan diteliti tentang strategi politik dalam membangun koalisi, dan strategi cara memenangkan paslon pada pemilu.

- **Praktis**

Semoga para pembaca semuanya dapat menambah pengetahuan tentang rancangan strategi partai politik dalam pemenangan Bupati di Kediri tahun 2015 dan bermanfaat untuk belajar bagaimana partai politik dalam membangun koalisi dengan partai lain.

1.5 Kerangka Konseptual/Teori

1.5.1 Strategi Politik

Mengemukakan ide yang tidak biasa tentang kekuasaan yang realis ini menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah para pengamat dan pelaku ilmu politik dan yang berkaitan. Jeffrey Pfeiffer, salah satu perintis kajian kekuasaan dan politik dalam organisasi mendefinisikan kekuasaan sebagai,

“ ... the potential ability to influence behavior, to change the course of events, to overcome resistance, and to get people to do things that they would not otherwise do.” [...

Kemampuan potensial untuk mempengaruhi perilaku, mengubah arah peristiwa, mengatasi perlawanan, dan membuat orang melakukan sesuatu yang tadinya tidak hendak mereka lakukan].

Menurut pandangan ¹Peter Schroder tentang jenis strategi politik adalah Ketika memilih strategi itu perlu untuk mengetahui garis dasar strategi yang diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat. Untuk setiap skema sejumlah strategi yang berbeda yang spesifik pilihan tergantung pada kondisi kerangka gambar yang diinginkan tujuan organisasi. Pada prinsipnya, strategi ofensif membedakan dan defensif: pertama dibagi menjadi strategi untuk memperluas pasar dan untuk menembus; kedua, strategi untuk melestarikan dan meninggalkan pasar;

¹ Peter Schroder, *Strategi Politik*, Jakarta, Fiedrich Naumman Stiffung, 2010, hal. 97.

- Strategi ofensif
- Strategi defensif
- Strategi untuk memperluas pasar
- Strategi untuk mempertahankan pasar (Strategi kompetitif), (Strategi pelanggan dan pengganda)
- Strategi untuk menembus pasar
- Strategi untuk meninggalkan pasar (Strategi Pelanggan), (Strategi Lingkungan)

Namun secara filosof klasik menurut *Machiavelli* melihat kekuasaan sebagai sebuah tujuan. Apabila ada yang mengatakan bahwa dengan mendapat kekuasaan maka itu akan memudahkan untuk meraih poin-poin lain, seperti kesejahteraan rakyat, penyebaran agama yang luas, ataupun pendidikan moral yang terarah, itu tidaklah benar. Hal yang terjadi adalah sebaliknya. Baik itu moral ataupun agama adalah cara-cara yang bisa digunakan untuk dapat menggapai kekuasaan. Kekuasaan bukanlah cara untuk meraih hal-hal lain, tapi kekuasaan merupakan inti dari apa yang diperbuat oleh seorang penguasa atau yang ingin berkuasa. Menggunakan kalimat dari Ahmad Suhelmi, bahwa kekuasaan haruslah diperoleh, digunakan, dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri. Ceritanya mengenai kekuasaan tidak jauh-jauh mengenai bagaimana seseorang yang sudah atau ingin memperoleh kekuasaan dapat menyikapi kekuasaan itu sendiri. Intinya ialah bagaimana ia dapat mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan tersebut.

Di dalam salah satu karyanya, *The Prince*, disebutkan bahwa seorang yang telah memegang kekuasaan penting untuk dapat berbuat hal-hal yang terpuji dan tidak terpuji. Seorang penguasa diyakini memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Di saat seorang penguasa bersifat sopan, maka di sisi lain ia juga bisa bersifat sembrono. Ketika seorang penguasa disebut dermawan, ramah, dan baik maka di saat yang sama ia juga bisa bersifat kikir, bengis, dan juga kejam. Hal tersebut adalah logis untuk dimiliki oleh seorang penguasa. Si penguasa harus bisa menggunakan sifat tak terpujinya itu. Ketika penguasa menggunakan cara-cara tak terpuji tapi itu memberikan kemakmuran kepada rakyat dan negaranya maka hal

itu dinilai lebih baik bila dibandingkan dengan bersifat sopan dan banyak pertimbangan tapi tidak memberi keamanan pada rakyat. Seorang penguasa tidak selalu dapat berbuat baik karena untuk menjaga kekuasaan dan stabilitas sering kali harus berbalik setir atau bersikap tidak terpuji.

Mengenai cara meraih kekuasaan, Machiavelli menekankan pentingnya sebuah pencitraan. Kebanyakan manusia menilai lebih lewat mata dari pada tangan mereka. Setiap orang dapat melihat anda, tapi hanya sedikit yang dapat menyentuh anda.² Seorang penguasa tidak perlu untuk menjadi ramah, dermawan, adil, pro-rakyat, taat, dan segala sikap baik lainnya dalam saat yang bersamaan. Hanya saja seorang penguasa harus memiliki keinginan untuk dianggap murah hati dan tidak kejam. Memiliki semua kualitas positif itu akan membawa kehancuran langsung pada penguasa terhadap kekuasaannya sendiri dan tidak memberi manfaat kepadanya. Hal yang lebih penting ialah membuat rakyat atau orang lain dalam jumlah banyak merasakan atau berpendapat bahwa sang penguasa memiliki seluruh karakteristik luhur tersebut. Pencitraan adalah langkah yang bisa diambil untuk bisa mendapatkan kondisi seperti itu. Machiavelli mencotohkan Ferdinand dari Aragon sebagai orang yang berhasil melakukan pencitraan taat dan luar biasa dibalik jubah keagamaan yang dikenakannya, namun pada kenyataannya ia tidak memiliki rasa kasih, keimanan, kemanusiaan, ataupun integritas.³

² Niccolo Machiavelli, *Sang Pangeran*, terj. oleh Noviatry, 2010, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, hal. 7

³ Niccolo Machiavelli, *Sang Pangeran*, terj. oleh Noviatry, 2010, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, hal. 57-58

Dalam salah satu tulisan, Machiavelli menyebutkan:

“biarkan dia (Penguasa) bertindak seperti pemanah yang lihai yang, merencanakan baik-baik sasaran bidikannya yang kelihatannya sangat jauh jaraknya itu, dan mengetahui batas-batas kekuatan yang bisa dicapai anak panahnya, membidik jauh di atas sasaran bidiknya, bukan berusaha mencapainya dengan kekuatannya sendiri atau kekuatan anak panahnya di arah yang begitu tinggi, tetapi berusaha untuk bisa dengan bantuan sasaran bidik yang cukup tinggi itu untuk membidik sasaran yang ingin dicapainya.”⁴

Dari kutipan di atas dapat kita tahu bahwa yang terpenting bagi seorang penguasa atau yang ingin menjadi penguasa ialah membuat rakyatnya merasa nyaman karena rakyat menilai sang penguasa dapat memberikan rasa aman. Apakah pada kenyataannya sang penguasa dapat membuktikan dan mewujudkan apa yang diharapkan oleh rakyat itu menjadi masalah nomor dua. Dengan cara pandang seperti itu, Machiavelli membolehkan segala cara, baik atau buruk, untuk dapat meraih dan mempertahankan kekuasaan. Substansinya adalah kekuasaan dipertahankan, kesejahteraan terjamin, dan keamanan dapat terjaga maka cara apapun bisa dilakukan untuk mendapatkan itu semua. Selain itu, Machiavelli juga berpendapat bahwa penting bagi seorang penguasa untuk dapat bertindak layaknya manusia dan juga binatang. Penguasa yang baik adalah yang dapat menggunakan cara manusia dan binatang pada saat yang tepat dan dalam porsi yang pas. Manusia sebenarnya dapat bertindak seperti binatang-binatang. Mungkin istilah *Mixed Animals* dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang penguasa dapat bertindak layaknya binatang-binatang. Pertanyaannya, kenapa harus binatang-binatang (*animals*), kenapa tidak binatang saja (*just an animal*) ? Dicontohkan bahwa seorang penguasa harus bisa bersikap seperti rubah dan singa. Rubah dapat tanggap dan mengenali jika ada jebakan yang merintangi kekuasaan tetapi rubah tidak dapat menghindari serangan dari serigala jika menghampiri.

⁴. Ahmad Suhelmi, 2007, *Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*, Jakarta : Gramedia, hal. 137

Berdasarkan itu, di saat yang bersamaan sang penguasa juga harus bisa bertindak sebagai singa. Memang singa tidak dapat mengenali jebakan seperti rubah, tetapi apabila datang serangan dari serigala maka singa dapat mengusirnya. Penguasa yang hanya mempunyai kemampuan untuk meniru satu binatang saja maka akan sangat terlihat kelemahannya. Sikap-sikap binatang tersebut harus dapat diterapkan dan digunakan. Jangan sampai seorang penguasa kehilangan sifat manusia, yaitu penyayang, baik, dan pemurah hanya karena lebih sering menerapkan sifat-sifat binatang, yaitu tamak, bengis, dan tanpa pikir panjang. Sifat atau cara-cara manusia dan binatang itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena hal tersebut ibarat *two sides of the same coin*.⁵ Para penulis kuno mengatakan bahwa seorang penguasa itu dapat dianalogikan seperti Achille yang dididik oleh Chiron, kuda pemberani berkepala manusia, sehingga penguasa dapat melatih diri mereka seperti yang dikatakan di atas. Kiasan tersebut berarti bahwa dengan berguru kepada makhluk yang setengah manusia dan setengah binatang agar sang penguasa mengetahui bagaimana bertindak sesuai dengan sifat keduanya, yaitu manusia dan binatang, dan dia tidak akan dapat *survive* kecuali dengan memiliki keduanya di dalam dirinya. Bagi Machiavelli, kekuasaan itu identik dengan negara/wilayah. Negara/wilayah merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua dan mutlak.⁶

Di dalam sebuah negara/wilayah kekuasaan itu semakin terlihat pengaruhnya karena negara/wilayah bisa dikatakan perwujudan dari kekuasaan tersebut. Dinamika hubungan seorang penguasa, negara/wilayah, dan rakyat menjadi cerita tersendiri dalam pembahasan mengenai kekuasaan dan negara/wilayah.

⁵ *Ibid*, hal. 133

⁶ Losco, Joseph dan Williams, Leonard, *Political Theory Classic and Contemporary Readings*, diterj. Oleh Munandar, Haris, Jakarta : Grafindo, 2005 hal. 592

Penting dicatat bahwa seorang penguasa yang bijak haruslah memiliki hal-hal yang disebut Joseph Losco dan Leonard Williams. Hal bijak tersebut yang pertama ialah sebuah kemampuan untuk menjadi buruk sekaligus, baik dicintai maupun ditakuti, sesuai dengan sifat manusia dan binatang yang diterapkan dalam proporsi yang tidak berlebihan dan tumpang tindih satu sama lain. Kedua ialah watak seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri. Hal yang ketiga adalah sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampun, dapat dipercaya, dan tulus. Machiavelli menasihati seorang penguasa untuk melakukan apapun yang diperlukan, sekalipun yang dilakukan adalah hal yang tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya, yang tidak lain adalah kebaikan bagi negara/wilayah itu sendiri. Penguasa perlu bertindak sebagai pemimpin yang bertangan besi jika itu yang dapat dilakukan untuk dapat menjaga negara/wilayah selama perombakan besar-besaran yang memerlukan kekuasaan demokratis banyak orang yang luhur.⁷ Penguasa tidak perlu merasa aneh dalam melakukan perbuatan tercela yang dengan itu negara/wilayah dapat bertahan. Hal ini dikarenakan jika semua tindakan tercela tersebut dilakukan dengan hati-hati dan tidak terlalu mencolok maka rakyat atau orang lain bisa saja memandang hal tersebut sebagai sebuah kebaikan. Dalam suatu keadaan bisa saja sesuatu hal yang baik malah mendatangkan hal buruk bagi negara/wilayah dan sebaliknya. Machiavelli yakin bahwa suatu negara/wilayah memerlukan moralitasnya sendiri, moralitas keberhasilan, yaitu keberhasilan dalam mempertahankan diri, menjamin keselamatan rakyat, keberhasilan dalam melakukan penaklukan ketika diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingannya sendiri. Moralitas negara itu sebisa mungkin dapat menyatukan negara/wilayah yang di dalamnya ada rakyat dan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan komposisi negara bangsa barat.

⁷ Lerner, Max, "Introduction," dalam Machiavelli, "The Prince and The Discourses", New York : The Modern Library, 1950 hal. Xxxiv

Kesamaan dan kesatuan nasional haruslah meliputi lidah (bahasa), budaya, dan batas ekonomi. *One was national unity and the idea of a common tongue, common culture, and common economic limits.*⁸ Selain itu Machiavelli juga mengungkapkan bahwa untuk mencapai suatu kesatuan dalam negara/wilayah dibutuhkan pemusatan kekuasaan untuk dapat menghancurkan rintangan-rintangan yang dapat memecah belah kesatuan negara/wilayah. Kekuasaan yang terpusat tersebut menurut Machiavelli berada pada tangan penguasa. Negara/wilayah tidak akan jalan dan tidak akan mampu bertahan lama jika para penguasanya tidak mampu memimpin, mengatur, dan menggunakan kekuasaan. Machiavelli merekomendasikan 4 seni menguasai atau mengatur suatu negara/wilayah.⁹ Cara pertama yang bisa dilakukan untuk mengatur suatu negara/wilayah ialah dengan menggunakan seluruh kekuasaan tanpa ampun secara mutlak. Cara pertama ini penting untuk monarki baru. Cara kedua ialah menggunakan bujukan dengan cerdas. Salah satu contoh konkret cara kedua ini ialah menggunakan teknik propaganda. Propaganda yang dimaksud Machiavelli ialah agama. Hal ini berkaitan dengan kondisi masa itu dimana kebijakan Roma memainkan sisi religius rakyat, semua kebijakan dilandaskan atas dasar agama. Cara ini mengakibatkan rakyat yang takut akan dosa akan senantiasa mematuhi aturan yang dibuat sekalipun tidak ada paksaan dari pihak penguasa. Cara ketiga ialah bahwa suatu negara/wilayah itu harus diatur dan dipimpin dengan langkah yang pasti, tidak plin plan dan terlalu banyak pertimbangan. Machiavelli berargumen bahwa satu-satunya jalan menuju kehancuran suatu negara/wilayah ialah keragu-raguan penguasa dalam menentukan arah negara/wilayahnya. Lebih aman berbuat salah selagi melangkah dengan pondasi kepemimpinan yang kuat, tanpa menunda-nunda, dan dengan pasti daripada kehilangan gagasan dengan penundaan dalam ketidakpastian.

⁸. William T. Jones, " *Master of Political Thought Vol II : Machiavelli to Bentham ed. by Edward McChesney Sait,*" London : George G. Harrap & Co. Ltd, 1947, hal. 44-50

⁹. Efriza, *Political Explore; Sebuah Kajian Ilmu Politik,* Alfa Beta, Bandung, 2012. Hal. 358

Cara keempat yaitu dengan memelihara tentara nasional yang kuat. Seorang pemimpin atau penguasa negara/wilayah tidak mungkin melakukan tiga hal sebelumnya tanpa mempunyai kekuatan angkatan bersenjata di bawah komandonya.

1.5.2 Strategi Elektoral

Menurut Huntington Pemilu sebagai media pembangunan politik rakyat dalam negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.¹⁰ Przeworski dalam mendefinikan demokrasi lewat pemilu(elektoral), ia menyebutkan pemilu merupakan sarana untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan.

Dalam representasi politik formal, pemilu(electoral) dianggap sebagai sarana untuk ‘menghadirkan’ rakyat dan memperoleh legitimasi kekuasaan dari proses tersebut. Menggunakan asumsi positivisme tentang konsep populasi dan sampel dalam memaknai representasi, maka pemilu dianggap sebagai suatu bentuk ‘menghadirkan rakyat’ (populasi) dimana kerangka populasinya adalah seluruh rakyat yang telah memenuhi syarat, untuk memilih di antara mereka sendiri, dalam rangka membentuk wakil rakyat (sampel) yang representatif dan mencerminkan populasinya. Sehingga ketika pun populasi yang hadir dalam pemilu tidak seratus persen, namun dilihat dari jumlah, proporsi, dan sebaran pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tetap bisa diklaim representatif, meskipun bisa juga hal ini digugat. Proses pemilu adalah proses yang representatif ‘menghadirkan’ populasi (seluruh rakyat yang memenuhi syarat memilih), akan tetapi pemilu akan selalu bermasalah menghasilkan representasi politik yang sempurna. Hasil akhir yang bermasalah selalu layak untuk digugat.

¹⁰. Larry Diamond(2003), *Op.Ciit*, hal 9-10

Hal tersebut terjadi karena ada dua hal yaitu (1) pada mekanisme memilih tidak dapat dipastikan berasosiasinya identitas dan kepentingan pemilih terhadap calon wakil/partai yang dipilihnya; kemudian (2) pada pilihan yang tersedia, baik partai politik dan kandidat wakil rakyat, adalah pilihan terbatas yang tidak representatif. Untuk itu segala upaya mewujudkan berbagai pilihan 'identitas' dan 'kepentingan' yang beragam (partai politik dan calon wakil rakyat) untuk hadir dalam politik elektoral tidak bisa dihalangi, dihambat, atau dibatasi melalui bentuk apapun dari regulasi kepemiluan. Dalam kerangka meminimalkan bias antara proses pemilu dengan hasil pemilu yang akan selalu menghadirkan *under-representation* secara identitas dan kepentingan, maka salah satunya dibutuhkan *affirmative action* untuk memberikan akses pada 'proses memilih pilihan yang lebih representatif' ataupun pada 'hasil untuk lebih dekat pada kondisi yang representatif. Representasi politik dapat dihasilkan dari proses elektoral (pemilu) dan non-elektoral. Proses elektoral menghasilkan representasi politik formal pada ranah jabatan eksekutif di pemerintahan dan legislatif di parlemen. Sedangkan dalam proses non-elektoral, representasi politik hadir dalam bentuk gerakan politik oleh kelompok, serikat, komunitas, atau organisasi masyarakat sipil. Tidak bisa dipungkiri bahwa konsep representasi politik digunakan dalam konteks masyarakat politik yang luas agar demokrasi dapat berjalan. Tetapi banyak kritik terhadap representasi politik formal melalui pemilu, termasuk mitos-mitos bahwa representasi politik adalah upaya menghadirkan yang tidak hadir, representasi adalah hubungan langsung antara yang mewakili dan diwakili, para wakil harus dipilih, dan representasi adalah menyangkut akuntabilitas, responsivitas dan kriteria kebaikan lainnya. Semua hal tersebut bisa diperdebatkan dan digugurkan, tulisan ini tidak hendak menggugat berbagai asumsi representasi politik, tetapi melihat bahwa representasi politik adalah suatu bentuk hubungan yang bisa bersifat antagonistik. Yaitu tidak selalu wakil dan terwakil dalam irama dan posisi yang sama, tetapi juga bisa menjadi 'kita' dan 'mereka' atau pun 'kawan' atau 'lawan'. Artinya hubungan yang terbentuk bersifat dinamis mengacu pada kepentingan yang menjadi pusat diskursus untuk mendefinisikan bentuk hubungan diantara mereka.

Kemungkinan kepentingan politik yang disepakati kemudian dibajak atau diabaikan oleh wakil atau partai (termasuk oleh partai alternatif jika nanti sudah terbangun), maka klaim representasi politik bisa hadir darimana saja (klaim representasi politik non-elektoral) untuk menghadirkan kembali kepentingan bersama yang telah disepakati, kemudian memaksa dan menuntut komitmen terhadap kepentingan, yang pada akhirnya bisa saja membentuk hubungan yang bersifat antagonistik. Di tengah kontestasi kepentingan antarpolitical di parlemen, dinamika hubungan antara gerakan politik dengan representasi politik formal bisa saja berubah, identifikasi 'kita' bisa saja memasukkan partai politik yang satu posisi kepentingan, dalam langkah yang sama dengan gerakan politik non-elektoral berhadapan dengan 'mereka' yang diidentifikasi sebagai kekuatan oligarki partai politik yang berseberangan. Oleh karena itu melihat hubungan wakil dan terwakil, memiliki dua dimensi relasi, pertama yang bersifat relasi individu antara pemilih dan wakil rakyatnya. Kedua relasi yang bersifat agregatif antara warga masyarakat dengan partai politik. Dari poin ketiga diskursus representasi politik saya ingin ingatkan kembali bahwa cara pandang *dual track* gerakan kiri, melalui aktor elektoral (partai) dan non-elektoral (gerakan) inilah yang harus diacu oleh partai politik alternatif kiri, bahwa mereka wajib aliansi dengan aktor representasi politik non-elektoral kiri sebagai penjaga paradigma gerakan dan kesadaran massa rakyat atas kepentingan, serta memastikan keputusan politik yang bersifat *bottom-up*. Dan representasi politik yang demokratis terwujud jika mereka yang kepentingannya dipengaruhi atau tersentuh oleh sebuah keputusan mempunyai kapasitas untuk (terlibat) memengaruhi pembuatan keputusan tersebut. Kapasitas memengaruhi keputusan dimaknai sebagai hadirnya keterlibatan atau partisipasi politik dari kelompok yang tersentuh dengan keputusan yang akan dihasilkan untuk meraih dan mendapatkan sumber daya. Artinya partisipasi politik adalah sesuatu yang bersifat longitudinal atau harus berkali-kali diupayakan hadir pada berbagai ruang politik yang ada dari dalam maupun dari luar, baik pada fase sebelum pemilu, pemilu, dan fase sesudah pemilu ketika partai dan wakil rakyat terpilih berada di parlemen menjalankan fungsinya. Kerentanan agenda politik untuk dibajak sangat besar, terlebih jika

hanya mengandalkan diri sebagai kekuatan non-elektoral yang hanya bisa mencantolkan kepentingan, kemudian mengawasi.

Bicara tentang keterlibatan pada fase pemilu, seperti sempat disebutkan di atas bahwa pemilu adalah sarana menghasilkan representasi politik yang mencakup hadirnya kepentingan dan identitas. Maka sebelum pemilu, sebaiknya partai politik alternatif harus terlebih dahulu merumuskan tentang kepentingan apa yang disepakati dan hendak diwujudkan. Realitanya pada fase ini, kepentingan lagi-lagi dihadirkan dalam pilihan-pilihan yang terbatas dan yang tertuang dalam platform dan program partai politik, calon wakil rakyat, atau kandidat. Artinya kepentingan dirumuskan berdasarkan pemaknaan elit secara *top-down*, para elit partai politik dan kandidat yang memberikan pilihan-pilihan kepentingan dan agenda yang ditawarkan dalam platform, visi misi, dan program. Ia tidak hadir dari proses agregasi kepentingan yang *bottom up* berasal dari rakyat dan dirumuskan bersama kemudian dituntut untuk diusung partai politik dan wakil rakyat. Sebagai contoh saja, apakah Nawacita, yang kemudian dirujuk sebagai acuan pembangunan pemerintah, telah melalui perumusan terlibat dari bawah atau sekadar pemaknaan oleh segelintir elit dari atas terhadap kondisi masyarakat?. Harus disadari bahwa program dan visi misi seorang kandidat terpilih pada akhirnya akan jadi agenda yang tertuang dalam RPJM berdasar pada amanat UU (walau bisa juga akhirnya sebagian tidak masuk).

Oleh karena itu, hadirnya partai politik alternatif harus memiliki skema kerja perumusan agenda dan kepentingan secara *bottom-up*, dan menghindari proses *top-down*, perumusan agenda dan kepentingan. Memastikan proses yang deliberatif dilakukan untuk mewujudkan kesadaran kolektif warga akan kepentingannya, bukan sekadar memilih orang baik yang tidak substansial (yang bisa menyimpang) tetapi memilih kepentingan mereka apa. Membangun keterhubungan antara fase sebelum pemilu dengan fase sesudah wakil rakyat terpilih di parlemen untuk menjalankan fungsinya yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan diperlukan sebuah perumusan dokumen kepentingan dan tuntutan sebagai pengikat. Dalam proses agregasi kepentingan pemilih menjadi suatu tuntutan yang terdokumentasi, membutuhkan aktor representasi politik non-

elektoral, yang bukan hanya berperan mengagregasi kepentingan pada masa sebelum pemilu tetapi juga menghadirkan kembali kepentingan pada masa setelah pemilu, suatu bentuk antisipasi dan pengawasan terhadap aktor representasi politik elektoral (anggota legislatif dan partai politik) yang mangkir dari agenda tuntutan yang telah dirumuskan bersama.

Berikut fase jalannya strategi pemilu seperti yang sudah dilaksanakan ditahun kemarin, yaitu :

Pertama, pembuatan tim sukses. Tim sukses akan mengorganisir segala kebutuhan pencalonan kandidat, pemetaan kekuatan politik, perencanaan pencalonan, dan marketing kandidat. Tim sukses terbagi dalam beberapa bagian yang terpenting; 1) survei popularitas kandidat dan perencanaan kampanye, 2) penggalangan dana, 3) hukum dan pemantauan pilkada, 4) pencitraan kandidat, 5) penguatan mesin politik (training), 6) kampanye dan media massa

Kedua, survei untuk pemetaan kekuatan politik. Tim sukses semestinya membuat survei untuk; 1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat, 2) memetakan keinginan pemilih, 3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter, 4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Ketiga, follow up hasil survei. Follow up hasil survei menjadi agenda kerja tim sukses yaitu:

1) Penguatan mesin politik. Riset dapat mengetahui mesin politik yang paling dekat dengan massa struktur sosial. lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lsm dll. Tugas tim sukses khususnya bagian training adalah melakukan penguatan terhadap mesin politik tersebut agar menjadi vote getter yang efektif.

2) *Candidat positioning*. Riset dapat menggambarkan citra kandidat yang diharapkan, dan agenda kerja yang diinginkan. Dari hasil riset ini tim sukses, khususnya bagian pencitraan, dapat merencanakan citra dan posisi kandidat agar sesuai dengan keinginan pemilih.

3) *Marketing*. Riset dapat mengetahui posisi kandidat di mata masyarakat, citra gubernur yang diinginkan masyarakat, agenda kerja yang diinginkan

masyarakat. Tim sukses (bagian kampanye dan media massa) harus memfollow-up dengan membuat visi misi, membuat materi kampanye, strategi kampanye, dan merencanakan media kampanye.

1.5.3 Strategi Koalisi

Di era reformasi ini juga partai politik bekerja profesional, memiliki kemampuan bekerjasama atau bernegosiasi dengan partai lain dalam meraih kemenangan, serta melihat pendukungnya sebagai aset yang harus terus dikumpulkan dan dipelihara. Salah satu strategi memenangkan pemilihan umum adalah melalui koalisi politik.

Dinamika politik yang saat ini dimainkan oleh partai politik adalah koalisi atau juga negosiasi. Koalisi secara kata dapat diartikan sebagai bergabung untuk dan koalisi dalam pemahaman ini adalah penggabungan partai politik untuk menjagokan kandidat dengan harapan terjadi *power sharing* atau pembagian kekuasaan. Teori koalisi politik dari William Riker yang menekankan prinsip ukuran (*Minimal Winning Coalitions*) dan Robert Axelrod yang menekankan prinsip kedekatan preferensi kebijakan (*Minimal Connected Winning*). maksudnya Riker dengan koalisi “*minimal winning*” menekankan bahwa partai politik bersifat “*office seeking*” (memaksimalkan kekuasaan), maka Axelrod dengan koalisi “*minimum connected*” menekankan partai politik sebagai “*policy seeking*” (mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai). Teori dengan pilihan rasional untuk melihat kontestasi pilihan-pilihan kepentingan yang menjadi dasar pengambilan keputusan para aktor untuk berkoalisi. Keputusan berkoalisi adalah sebuah pilihan rasional dalam rangka memaksimalkan kepentingan atau keuntungan yang dapat diraih. Koalisi tidak berarti penggabungan ideologi, melainkan hanya bentuk fisiknya saja, sehingga dapat dikatakan bahwa koalisi hanya bersifat momentum semata atau insidental, lebih jauh lagi koalisi tidak bersifat menetap. Walaupun demikian koalisi tidak berarti terjadinya *power sharing*, karena hal itu sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang dianut, sehingga koalisi akan sangat bermanfaat jika sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem parlementer, tetapi akan sangat bergantung pada presiden terpilih

jika sistem yang dipakai adalah sistem presidensial. Hal ini dapat dilihat dari dipilihnya Boediono sebagai wakil presiden yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Dipilihnya Boediono ditentukan sendiri oleh kandidat presiden, dengan kenyataan itu wajar kalau diprediksi keanggotaan kabinet tidak oleh partai politik, melainkan dipilih sendiri oleh presiden. Koalisi umumnya dikenal dengan model sistem kepartaian dua partai, yaitu partai yang menang pemilu yang kemudian menjadi penguasa pemerintahan dan partai yang kalah dalam pemilu yang kemudian menjadi oposisi. Hal itu menunjukkan bahwa sistem pemilunya juga adalah sistem distrik dan bukan sistem proporsional. Adapun sistem ketatanegaraannya adalah sistem presidensiil dimana presiden-lah yang bertanggungjawab ke parlemen. Akan tetapi di beberapa negara terjadi penyimpangan. Koalisi dilakukan dengan sistem multi partai dengan harapan terjadi penggabungan suara pemilih, hal itu berakibat koalisi dilakukan dengan tujuan terjadinya *sharing* kekuasaan jika presiden terpilih dari koalisi tersebut. Sistem proporsional yang dilakukan menyebabkan sewaktu pemilu untuk memilih legislator partai-partai politik tersebut bisa saja bertentangan, tetapi sewaktu koalisi untuk pemilu presiden mereka bergabung dengan tujuan untuk *power sharing*. Sistem parlementer yang seharusnya hanya memilih perdana menteri yang akan bertanggung jawab ke parlemen, akan tetapi dengan penyimpangan ini maka sistem parlementer juga menafasi/mempengaruhi sistem presidensiil yang telah digariskan undang-undang. Akibatnya koalisi yang terjadi lebih bersifat untuk mencari dan mempertahankan kepentingan.

I.6 Metode dan Prosedur Penelitian

I.6.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berusaha untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Strategi Partai Gerindra dalam pemenangan pasangan calon Dr. Ari Purnomo Adi dengan Arifin Tafsir di Pilbup 2015 di Kabupaten Kediri. Dalam

menyusun strategi partai Gerindra dalam pemenangan Ari-Arifin di Pilbub 2015 ini, hendaklah dilihat pertama adalah bagaimana Partai Gerindra membangun koalisi dengan PAN untuk dapat mengusung pasangan calon Ari-Arifin dalam pilkada 2015 di Kabupaten Kediri, dan yang kedua adalah strategi apa yang dirancang Gerindra untuk memenangkan pasangan calonnya pada Pilkada 2015 di Kabupaten Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1987) adalah prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹¹ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berwujud kata – kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati (*observable*). Penelitian ini dilakukan pada wilayah tertentu tempat fenomena terjadi. Dilakukan untuk memahami kejadian yang sebenarnya, serta orang yang diwawancarai adalah orang yang terlibat langsung dalam penerapan suatu strategi, yang akan memberikan data berupa kata – kata tertulis berupa kesaksian mengenai fenomena tertentu. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, Nilai kebenarannya bersifat *kredibilitas*, yakni kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep responden. *Ketiga*, penerapan aplikasinya bersifat *transferabilitas* yakni hasil penelitian kualitatif tersebut dapat digunakan atau diterapkan pada kasus atau situasi lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Tujuan penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam dan menyeluruh mengenai suatu fenomena penggunaan strategi marketing pada pemenangan Kepala Daerah, perilaku dan wawancara dari tim sukses, serta opini publik. Pemilihan jenis penelitian lapangan didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya : peneliti dapat meneliti secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini dan dapat berinteraksi secara mendalam dengan individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

¹¹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian saya adalah deskriptif, karena penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena/peristiwa tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya; perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang empiris. Dalam penelitian ini, saya bermaksud untuk mengetahui bagaimana strategi Partai Gerindra dalam membangun koalisi dengan PAN yang mengusung paslon A-A pada Pilbup di Kabupaten Kediri 2015. dan guna mengetahui bagaimana cara Partai Gerindra dalam membangun strateginya untuk memenangkan paslonnya tersebut pada Pilbup 2015 di Kediri.

1.6.3 Metode Penelitian

Studi Kasus :

Karena saya melakukan penelitian yang mendalam kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri beserta dewan staff DPC Kabupaten Kediri tentang strategi Partai Gerindra dalam kemenangan paslonnya di Pilbup 2015 Kabupaten Kediri. Penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis informasi-informasi yang telah diberikan oleh narasumber.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini saya lakukan di rumah Ketua DPC Gerindra, Bpk. Arif Junaidi, di rumah Sekjen DPC Gerindra, Bpk. Rozaq dan Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri, tepatnya Jalan Pamenang depan kantor DPD PKB Kabupaten Kediri. Dikarenakan semua informasi tentang strategi dan jalannya kegiatan team, dan informasi tentang relawan pasangan nomer urut 2 ini berpusat di kantor DPC Partai Gerindra Jalan Pamenang Kabupaten Kediri

1.6.5 Subyek Penelitian

Untuk penelitian ini memerlukan informan atau narasumber yang langsung diberikan langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra bersama sekjen Partai

Gerindra yang berada di Kabupaten Kediri. Informasi yang merupakan narasumber data yang diperoleh langsung pada tempat interview saya di kantor DPC Partai Gerindra langsung. Dari beberapa informan nantinya diharapkan dapat menemukan jawaban penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan juga tujuan masalah yang diteliti. Kata-kata atau ucapan yang diberikan langsung dari orang yang ada di kantor DPC Partai Gerindra adalah sumber yang akan diwawancarai sebagai sumber utama penelitian.

1.6.6 Instrumen

Dengan mewawancarai Ketua DPC Partai Gerindra beserta sekjen dan staff DPC Partai Gerindra pertanyaan-pertanyaan penelitian saya dijawab dengan benar dan *real* apa adanya sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang sedang berlangsung. Saya melontarkan tanya jawab kepada anggota DPC secara lisan dan secara tertulis yang sudah terlampir pada wawancara terstruktur.

1.6.7 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara secara mendalam bersama narasumber guna memperoleh spesifik data dengan tanya jawab beserta diikuti bertatap muka langsung dengan para anggota DPC Partai Gerindra di kantor. Wawancara berdasarkan pada pedoman rumusan masalah yang akan diteliti serta menggunakan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung tertulis dan terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan secara terbuka juga dibantu dengan recorder dari selular dan penelitian secara informal.

1.6.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian besar dalam penjabaran data. Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Data yang telah saya peroleh dari hasil wawancara dengan anggota DPC Partai Gerindra serta dokumen-dokumen yang dianggap penting dan perlu seperti buku-buku, media cetak, dan data dari sumber internet untuk

dikumpulkan, kemudian diseleksi setelah itu dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman teori strategi elektoral guna memberikan referensi yang jelas dari fenomena yang saya teliti.

